

IMPLEMENTASI NILAI KONSTITUSIONAL UUD 1945 DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENENGAH

Joesa Yolandari¹, Flery Batami², Yuli Fitriani³, Jhoffy Egraygi⁴, Randes⁵
Rari Ferera⁶, Saskia Gita Sakanti⁷

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

joesa@umb.ac.id , flerybatami1908@gmail.com , jhoffyegraygi@gmail.com ,
randesandes71@gmail.com , rariferera@gmail.com , sgitasakanti@gmail.com

ABSTRACT

Civic Education plays a strategic role in developing democratic, responsible, and constitutionally aware citizens in line with the principles outlined in the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. However, globalization, the digital era, and the declining legal awareness among young people have created challenges in implementing constitutional values within educational settings. The purpose of this study is to examine how the 1945 Constitution's principles are used in civic education at secondary schools, identify supporting and inhibiting factors, and examine their contribution to students' constitutional awareness. This study used a descriptive method in conjunction with a qualitative approach. Information was gathered using literature reviews, observations of learning practices, and documentation, and were analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that constitutional values are implemented through three main dimensions: integration into classroom learning, strengthening democratic school culture, and encouraging student participation in democratic activities. Supporting factors include teacher competence, democratic school culture, the application of the Pancasila Student Profile with the Merdeka Curriculum Increasing Project Strength. Meanwhile, inhibiting factors consist of the dominance of cognitive-oriented learning, limited teacher competence, low digital literacy, and inadequate contextual teaching materials. The study determines that the application of constitutional values significantly contributes to strengthening students' legal awareness, democratic attitudes, and civic responsibility as citizens.

Keywords: constitutional values, 1945 Constitution, Civic Education, constitutional awareness, secondary school.

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk membangun warga negara yang demokratis, berkarakter, dan memiliki kesadaran konstitusional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Namun, perkembangan globalisasi, era digital, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai konstitusional di lingkungan sekolah. Penelitian ini menyelidiki bagaimana nilai-nilai konstitusional UUD 1945 diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengkaji kontribusinya terhadap pembentukan kesadaran konstitusional peserta didik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian literatur, observasi praktik pembelajaran, dan dokumentasi. Kemudian, metode analisis isi (content analysis)

digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai konstitusional dilakukan melalui integrasi dalam proses pembelajaran, penguatan budaya sekolah, dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan demokratis. Faktor pendukung meliputi kompetensi guru, budaya sekolah yang demokratis, implementasi Kurikulum Merdeka, serta proyek untuk meningkatkan profil siswa Pancasila. Adapun faktor penghambat mencakup dominasi pembelajaran kognitif, keterbatasan kompetensi guru, rendahnya literasi digital, dan kurangnya bahan ajar kontekstual. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai konstitusional UUD 1945 berkontribusi dalam membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran hukum, sikap demokratis, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Kata Kunci: nilai konstitusional, UUD 1945, Pendidikan Kewarganegaraan, kesadaran konstitusional, sekolah menengah.

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis, kritis, dan berorientasi pada nilai-nilai konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pendidikan nasional, implementasi nilai konstitusional tidak hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan mengenai hukum dan ketatanegaraan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai demokrasi, hak, keadilan sosial, hak asasi manusia (HAM), dan tugas warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Widiatmaka, 2022a), Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana utama pembentukan civic disposition, civic

knowledge dan civic skill yang menjadi fondasi karakter warga negara Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh (Maftuh, 2022) yang menyatakan bahwa PKn berperan penting dalam mentransformasikan nilai ideologi negara dan nasionalisme kepada generasi muda di tengah tantangan globalisasi. Dengan demikian, implementasi nilai konstitusional UUD 1945 dalam pembelajaran PKn menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun identitas kebangsaan peserta didik di sekolah menengah.

Urgensi implementasi nilai konstitusional semakin meningkat seiring berkembangnya tantangan sosial di era digital. Fenomena intoleransi, penyebaran hoaks politik, rendahnya literasi demokrasi, serta meningkatnya perilaku individualistik di kalangan remaja menunjukkan adanya kesenjangan antara

pemahaman konstitusi dengan praktik kehidupan kewarganegaraan. (Zahrah & Habibah, 2022) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat di era digital sering kali tidak diiringi dengan kesadaran konstitusional dan penghormatan terhadap hak orang lain. Di sisi lain, (Nurjaman & Budimansyah, 2022) menemukan bahwa rendahnya kesadaran politik generasi muda disebabkan oleh lemahnya proses internalisasi nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran di sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran PKn belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran konstitusional peserta didik secara substantif. Oleh karena itu, sekolah menengah perlu memperkuat implementasi nilai UUD 1945 melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn cenderung berfokus pada aspek kognitif daripada penguatan perilaku dan sikap konstitusional peserta didik. (Sarkadi et al., 2022) menegaskan bahwa pembelajaran PKn di Indonesia masih dominan menekankan hafalan konsep dibandingkan pembentukan karakter

demokratis dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peserta didik memahami teori mengenai konstitusi dan demokrasi, tetapi belum mampu mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan (Virgiawan & Sundawa, 2022) juga mengungkapkan bahwa pembelajaran daring pascapandemi menyebabkan penurunan interaksi sosial yang berdampak pada lemahnya pembentukan civic responsibility siswa. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara capaian akademik dan pembentukan karakter konstitusional peserta didik. Dengan demikian, implementasi nilai konstitusional UUD 1945 membutuhkan strategi pembelajaran yang bermanfaat dan transformatif.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tetap memiliki potensi besar dalam memperkuat nilai konstitusional apabila diintegrasikan dengan model pembelajaran yang inovatif. (Sarkadi et al., 2022) menemukan bahwa model pembelajaran RECE (Reflective, Engage, Collaborative, and Elaborative) mampu

meningkatkan kemampuan reflektif dan kolaboratif siswa dalam memahami nilai karakter kewarganegaraan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif dapat membantu siswa mengadopsi prinsip demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab dalam diri sosial secara lebih efektif. Selain itu, (Kusmayanti et al., 2022) menjelaskan bahwa pendekatan Living Values Education dalam pembelajaran PKn mampu meningkatkan sikap anti-radikalisme dan toleransi peserta didik di sekolah menengah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai konstitusional akan lebih optimal apabila pembelajaran PKn dirancang secara kontekstual dan berbasis pengalaman sosial siswa. Oleh sebab itu, inovasi model pembelajaran menjadi faktor penting dalam penguatan pendidikan konstitusional. Di sisi lain, terdapat perdebatan akademik mengenai efektivitas implementasi nilai konstitusional dalam pembelajaran PKn. Sebagian peneliti berpendapat bahwa PKn telah berhasil menjadi instrumen pembentukan karakter bangsa dan penguatan nasionalisme peserta didik. (Widiatmaka, 2022) menyatakan

bahwa PKn memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai Pancasila dan konstitusi kepada generasi muda melalui pendidikan formal. Akan tetapi, pandangan tersebut berbeda dengan hasil penelitian (Virgiawan & Sundawa, 2022) yang menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek praktik dan pembiasaan sosial siswa. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa kesuksesan penerapan nilai konstitusional tidak saja ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran, kompetensi guru, dan kultur sekolah. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian tambahan untuk menemukan komponen yang memengaruhi efektivitas implementasi nilai UUD 1945 di sekolah menengah.

Dalam konteks pendidikan nasional, implementasi nilai konstitusional juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter antikorupsi dan tanggung jawab sosial siswa (Aksinudin et al., 2022) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi penting dalam menanamkan karakter

antikorupsi melalui penguatan nilai integritas, kejujuran, dan kewajiban. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa nilai konstitusional tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan politik, tetapi juga dengan moralitas sosial warga negara. Pradana dan (Andriyana & Idris, 2022) menambahkan bahwa pembelajaran PKn dapat menjadi media penguatan semangat bela negara melalui pemahaman hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Dengan demikian, implementasi nilai UUD 1945 dalam PKn memiliki dimensi yang luas, mulai dari pembentukan kesadaran hukum hingga penguatan karakter kebangsaan peserta didik. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan konstitusional memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

Namun demikian, implementasi nilai konstitusional di sekolah menengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan pedagogis. (Pasandaran & Katuuk, 2022) menjelaskan bahwa tantangan utama pendidikan kewarganegaraan di era baru adalah rendahnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran nilai serta belum

optimalnya pengembangan paradigma pembelajaran kewarganegaraan yang berbasis partisipasi. Selain itu, pembelajaran PKn sering kali masih berpusat pada guru, sehingga kurang ruang untuk pertumbuhan siswa kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap persoalan konstitusional. (Kemala, 2022) menilai bahwa pembelajaran PKn seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai transmission citizenship, tetapi juga reflective inquiry yang mendorong siswa aktif menyelesaikan masalah sosial secara demokratis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai konstitusional membutuhkan perubahan paradigma pembelajaran dari sekadar hafalan normatif menuju praktik demokrasi yang nyata di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penguatan kultur sekolah demokratis menjadi komponen penting dari pelaksanaan nilai-nilai UUD 1945.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas pendidikan karakter, nasionalisme, dan demokrasi dalam pembelajaran PKn secara umum, sedangkan kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi nilai konstitusional UUD 1945 pada jenjang sekolah menengah

masih cukup terbatas. Banyak penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada pembuatan model pembelajaran atau penguatan nilai Pancasila tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan praktik implementasi nilai konstitusi dalam aktivitas pembelajaran siswa. Penelitian sebelumnya juga sering menggunakan pendekatan konseptual dan deskriptif, sehingga belum banyak mengeksplorasi pengalaman nyata peserta didik dalam memahami dan menerapkan nilai konstitusional di lingkungan sekolah. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai konstitusional UUD 1945 diimplementasikan dalam pembelajaran PKn di sekolah menengah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting untuk memperkaya kajian pendidikan kewarganegaraan berbasis konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena implementasi nilai konstitusional di sekolah menengah berpengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi dan karakter generasi muda Indonesia di masa depan. Penguatan kesadaran

konstitusional sejak dini dapat membantu peserta didik memahami mengimbangi hak dan kewajiban warga negara dan menumbuhkan sikap yang toleran, demokratis, dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan konstitusional juga dapat menjadi benteng terhadap berkembangnya radikalisme, intoleransi, dan disinformasi digital di kalangan remaja. (Kusmayanti et al., 2022) menunjukkan bahwa penguatan nilai kehidupan dalam pembelajaran PKn mampu meningkatkan sikap toleransi dan anti-radikalisme siswa. Oleh karena itu, implementasi nilai UUD 1945 dalam pembelajaran PKn tidak hanya memiliki dimensi akademik, tetapi juga memiliki dampak sosial dan kebangsaan yang luas. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk pembangunan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi berupa penguatan implementasi nilai konstitusional melalui pembelajaran PKn yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman sosial siswa. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui

diskusi konstitusi, studi kasus sosial, pembelajaran berbasis proyek kewarganegaraan, serta penguatan budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Selain itu, guru PKn harus memasukkan nilai-nilai UUD 1945 ke dalam kegiatan sehari-hari siswa agar siswa tidak hanya memahami konstitusi secara teoretis tetapi juga mampu menerapkannya ke dunia nyata. Penggunaan model pembelajaran reflektif seperti RECE dan pendekatan Living Values Education juga dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan internalisasi nilai konstitusional siswa. Dengan demikian, implementasi nilai konstitusional UUD 1945 di sekolah menengah diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap negara mereka.

B. Metode Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diterapkan dalam kurikulum

pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian dalam lingkungan alami, yang memungkinkan mereka untuk mengkaji fenomena secara menyeluruh. Menurut (Hemafitria et al., 2024)), penelitian kualitatif deskriptif mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam lingkungan pendidikan.

Metode deskriptif menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi nilai-nilai konstitusional UUD 1945 dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, serta aktivitas peserta didik di lingkungan sekolah menengah. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi nilai konstitusional, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap pembentukan kesadaran konstitusional peserta didik. (Murdiansyah et al., 2025) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif efektif digunakan untuk

menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan karena mampu mengungkap fenomena sosial secara mendalam berdasarkan realitas yang terjadi.

Kajian tersebut memberikan sumber data utama untuk penelitian ini. literatur terkini serta observasi terhadap penerapan berbagai metode pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Metode yang diamati meliputi diskusi interaktif, studi kasus, proyek berbasis nilai, simulasi peran, dan debat akademik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumentasi visual berupa infografik pembelajaran sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis.

Analisis isi, atau content analysis, adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara kualitatif dengan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam simbol, teks, serta struktur pembelajaran yang mendukung pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan. Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya mengidentifikasi pola, konsep, dan makna yang relevan dengan

implementasi pendidikan Pancasila dalam proses pembelajaran.

Dengan membandingkan hasil penelitian, triangulasi sumber meningkatkan validitas data yang diperoleh dari aneka literatur ilmiah dengan data visual yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, keabsahan data juga didukung melalui teknik pengecekan sejawat (peer debriefing), yakni proses penelaahan dan diskusi dengan rekan peneliti untuk mengurangi subjektivitas dalam penafsiran data. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa hasil analisis mampu merepresentasikan kondisi aktual praktik pendidikan kewarganegaraan serta relevan dengan konteks kurikulum nasional di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Nilai-Nilai Konstitusional UUD 1945 dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai konstitusional UUD 1945 yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah dilaksanakan melalui tiga dimensi utama, yaitu integrasi dalam proses pembelajaran, penguatan

budaya sekolah, dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan demokratis. Implementasi tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab warga negara, supremasi hukum, dan demokrasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Hemafitria et al., 2024) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting secara strategis dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila melalui pendidikan yang berfokus pada penguatan prinsip-prinsip kebangsaan, demokrasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka mampu memperkuat dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikiran kritis, dan kreatif pada peserta didik.

Dalam proses belajar, guru mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional melalui diskusi

kelompok, studi kasus, problem based learning, project citizen, debat konstitusi, dan analisis masalah nyata yang terkait dengan kehidupan nasional dan internasional. Melalui pendekatan tersebut, Peserta didik tidak hanya memiliki pemahaman normatif tentang Konstitusi 1945, tetapi mereka juga mampu mengaitkannya dengan realitas sosial yang mereka temui setiap hari.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi nilai konstitusional menjadi lebih efektif ketika pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menyelesaikan permasalahan sosial secara demokratis. Praktik tersebut mencerminkan implementasi Rakyat memegang kendali atas kedaulatan, menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

2. Internalisasi Nilai Konstitusional Melalui Budaya Sekolah

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi prinsip-prinsip konstitusional tidak

hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh kebiasaan sekolah yang mendukung. Budaya sekolah yang demokratis memberikan ruang bagi siswa untuk mempraktikkan prinsip-prinsip konstitusi secara langsung melalui berbagai aktivitas sekolah.

(Wahidin & Handayani, 2026) menjelaskan bahwa penguatan karakter melalui budaya sekolah merupakan salah satu strategi utama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Guru berperan sebagai teladan, fasilitator, pembimbing nilai, dan evaluator perkembangan karakter peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian, budaya sekolah yang mendukung implementasi nilai konstitusional ditunjukkan melalui pelaksanaan musyawarah dalam organisasi siswa, pemilihan pengurus OSIS secara demokratis, penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya, penegakan tata tertib secara adil, serta pemberian Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas sekolah. Praktik tersebut memperkuat pemahaman siswa mengenai prinsip kesetaraan, dan demokrasi yang

menjadi bagian penting dari nilai-nilai konstitusional UUD 1945.

Hasilnya sejalan dengan penelitian. (Asy'ari et al., 2024) yang menyatakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan demokratis menjadi faktor penting dalam pembentukan sifat kewarganegaraan siswa. Sekolah yang mampu mengembangkan budaya partisipatif cenderung lebih berhasil menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan konstitusional kepada peserta didik.

3. Pembentukan Kesadaran Konstitusional Peserta Didik

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai konstitusional dalam Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap terbentuknya kesadaran konstitusional peserta didik. Kesadaran tersebut tercermin dalam meningkatnya pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban warga negara, kepatuhan terhadap aturan sekolah, penghormatan terhadap keberagaman, serta kemampuan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

Kesadaran konstitusional merupakan salah satu indikator keberhasilan Pendidikan

Kewarganegaraan karena mencerminkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai yang tercakup dalam konstitusi bangsa. penelitian ini, sebagian besar peserta didik menunjukkan kemampuan untuk menghubungkan materi konstitusi dengan fenomena sosial seperti toleransi, demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Implementasi nilai konstitusional yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan pendidikan masyarakat, keterampilan masyarakat, dan disposisi masyarakat siswa.

4. Faktor Pendukung Implementasi Nilai Konstitusional

Penelitian menemukan beberapa komponen yang mendukung penerapan prinsip konstitusional UUD 1945 di sekolah menengah.

Pertama, kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Guru yang mampu menghubungkan materi konstitusi dengan permasalahan nyata lebih mudah menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap pentingnya nilai-nilai konstitusional.

Kedua, penerapan Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. (Hemafitria et al., 2024) menyatakan bahwa integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.

Ketiga, dukungan budaya sekolah yang demokratis serta keterlibatan kepala sekolah dalam penguatan pendidikan karakter. Dengan lingkungan sekolah yang baik, siswa dapat mempraktikkan nilai-nilai konstitusi secara langsung melalui berbagai kegiatan sekolah.

Keempat, implementasi proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang mendorong siswa untuk

pelatihan dan pendampingan guru menjadi salah satu hambatan dalam implementasi pendidikan karakter berbasis Kurikulum Merdeka.

Ketiga, pengaruh perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Arus informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memengaruhi pemahaman peserta didik mengenai demokrasi, hukum, dan kehidupan bernegara. Rendahnya literasi digital dapat menyebabkan peserta didik lebih mudah terpapar hoaks, ujaran kebencian, serta informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.

Selain faktor pendukung, penelitian juga menemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi nilai-nilai konstitusional UUD 1945.

Pertama, masih adanya pembelajaran yang berorientasi pada aspek kognitif dan pencapaian akademik sehingga internalisasi nilai-nilai konstitusional belum berlangsung secara optimal. Kondisi ini menyebabkan peserta didik memahami konstitusi sebatas teori tanpa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, keterbatasan kompetensi sebagian guru dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman. (Wahidin & Handayani, 2026) menemukan bahwa kurangnya

295

6. Implikasi terhadap Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai konstitusional UUD 1945 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah menengah. Implementasi tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak hanya itu, tetapi juga membangun sifat warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, toleran, dan menghormati hukum.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada implementasi nilai konstitusional mampu menjadi sarana efektif dalam membangun budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual, peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari kehidupan berkonstitusi.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip konstitusional UUD 1945 dalam Pendidikan

Kewarganegaraan termasuk strategi yang relevan untuk memperkuat kesadaran konstitusional generasi muda. Di tengah kesulitan globalisasi dan kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang semakin kompleks. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kesuksesan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berdasarkan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga dari keterampilan siswa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai konstitusional UUD 1945 dalam Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah menengah dilaksanakan melalui integrasi dalam proses pembelajaran, penguatan budaya sekolah, serta partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan demokratis di lingkungan sekolah. Ketiga aspek tersebut terbukti berperan penting dalam menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai konstitusi seperti demokrasi,

supremasi hukum, hak asasi manusia, dan tanggung jawab warga negara.

Implementasi nilai konstitusional tidak hanya meningkatkan pengetahuan kognitif peserta didik, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan sikap demokratis, kesadaran hukum, toleransi, serta tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.

Namun demikian, proses implementasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti dominasi pembelajaran kognitif, keterbatasan kompetensi guru, rendahnya literasi digital, serta kurangnya bahan ajar yang kontekstual. Di sisi lain, faktor pendukung seperti Kurikulum Merdeka, kompetensi guru yang inovatif, budaya sekolah yang demokratis, serta program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi pendorong utama keberhasilan implementasi nilai konstitusional.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan implementasi nilai-nilai konstitusional UUD 1945 dalam Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting

untuk membentuk generasi muda yang demokratis, sadar hukum, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksinudin, S., Wiyono, S., & Nariswari, A. F. (2022). Civic education as anti-corruption education for college students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 53–63.
- Alanur, S. N., Jamaludin, J., & Amus, S. (2023). Analisis Profil Pelajar Pancasila Dalam Buku Teks Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 179–190. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.5787>
- Andriyana, A., & Idris, M. (2022). Aktualisasi Pembelajaran Real Learning Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 11(1).
- Apriana, S., Suriswo, S., & Agung N, R. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Penguatan Profil Pelajar Pancasila Gugus Raden Saleh. *Journal of Education Research*, 5(3), 3034–3043. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1408>
- Asy'ari, A. H., Irsu, A. F., Mujiono, A. P., & Putricia, A. R. (2024). Dimensi dan Tantangan: Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 22224–22233.

- Hemafitria, H., Rohani, R., & Safira, M. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Perwujudan Profil Pelajar Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 180–194. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i1.7382>
- Kemala, V. (2022). Internalization of Pancasila Values and Nasionalism in Citizenship Education. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 1(1), 7–16.
- Kusmayanti, M., Komalasari, K., & Saputra, T. (2022). Students' Perception Towards Pancasila and Civic Education Learning Based on Living Values Education. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 237–242.
- Maftuh, B. (2022). *Internalization of Pancasila values and nationalism through citizenship education*. Educationist.
- Murdiansyah, E. B., Jasrudin, J., Ali, M., & Hariyadi, S. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam Pembelajaran Kewarganegaraan: Kajian Kualitatif Deskriptif di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(3).
- Nurjaman, A., & Budimansyah, D. (2022). Internalization of the Value of Political Education Through the Contextual Teaching and Learning (CTL) Approach in Citizenship Education Subjects in the Digital Era. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 39–45.
- Pasandaran, S., & Katuuk, D. A. (2022). Education for Citizens in the New Era: Challenges and Opportunities in Realizing Constitutional Rights. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 658–660.
- Sarkadi, Casmana, A. R., Hisyam, C. J., & Wardatussa'idah, I. (2022). Integrating Character Education Into the RECE Learning Model Through Pancasila and Citizenship Education Subjects. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.841037>
- Virgiawan, I., & Sundawa, D. (2022). Building civic responsibility and democratic attitudes of students in learning Pancasila and civic education. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 170–174.
- Wahidin, D., & Handayani, D. (2026). Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka: Studi Kualitatif Perspektif Guru Smp Negeri 177 Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia (JPTI)*, 6(3), 522–530. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.1089>
- Widiatmaka, P. (2022a). Perkembangan pendidikan kewarganegaraan (PKn) di dalam membangun karakter bangsa peserta didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10.
- Widiatmaka, P. (2022b). Perkembangan pendidikan kewarganegaraan (PKn) di dalam membangun karakter bangsa peserta didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10.
- Zahrah, F., & Habibah, S. M. (2022). Freedom Of Speech and Human Rights: What Can Civic Education Do? *Jurnal HAM*, 13, 495